

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
1. Spesifikasi Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan	16
3. Sifat Penelitian	16
4. Tahap Penelitian.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Metode Analisis Data	20
7. Lokasi Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	22
A. Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	22
B. Objek dan Subjek BPHTB	25
C. Pengertian Jual Beli Tanah sebelum dan setelah keluarnya UUPA....	28
1. Pengertian Jual beli tanah sebelum UUPA.....	29
2. Pengertian Pejabat pembuat akta tanah	35
3. Tugas, Wewenang dan kebijakan Pejabat pembuat Akta tanah.....	40

4. Wilayah kerja Pejabat pembuat Akta tanah.....	42
5. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak Pembangunan Nasional	44
BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN	55
A. Prosedur dalam pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan terhadap transaksi jual beli tanah dan atau bangunan.....	55
B. Peranan PPAT/Notaris dalam Pemungutan Pajak BPHTB	65
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG DALAM MENENTUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	69
A. Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2011 tentang BPHTB dilihat dalam praktik administrasi Negara terkait ketentuan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.....	69
B. Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan BPHTB di Kabupaten Karawang.....	93
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	